

DISRUPSI SEBAGAI PROBLEM SUBJEK, PERSONA, DAN KOMUNITAS

Aloysius Widyawan Louis

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
widyawan@ukwms.ac.id

Abstrak

Manusia kini hidup dalam era disrupsi yang mengguncang seluruh sendi kehidupannya. Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu faktor penentu disrupsi. Di satu sisi, guncangan itu menantang manusia untuk beradaptasi secara cepat dengan segala perubahan yang ada. Di sisi lain, disrupsi ini menggerus, meninggalkan, menyingkirkan, dan mengabaikan manusia-manusia yang dianggap tak mumpuni mengikuti arus perubahan zaman. Disrupsi ini bisa menjadi locus philosophicus untuk memperdalam makna hakiki kemanusiaan. Pokok-pokok pemikiran personalistik Karol Wojtyla (1920-2005), seorang filsuf, teolog, dan paus dari Polandia, dapat dijadikan pisau analisis untuk membedah dan menjawab tantangan disrupsi. Beranjak dari analisis atas tindakan, Wojtyla melihat bahwa teknologi beserta dampaknya yang luas bagi kehidupan manusia tak pernah boleh diabaikan, disingkirkan atau diperalat. Manusia sebagai persona adalah subjek dari tindakan. Melalui tindakannya, ia mengejawantahkan ke-persona-annya sebagai pribadi dan bagian dari komunitas manusia yang berdinamika mencapai tujuan-tujuan hidup pribadi dan bersama. Dalam refleksinya itu, ia mengungkapkan bahwa partisipasi adalah kunci bagi persona mewujudkan komunitas yang manusiawi, bebas dari berbagai bentuk alienasi, bahkan alienasi yang menjauhkan manusia dari dirinya sendiri, dari komunitasnya, dan dari berbagai arus perubahan zaman.

Kata kunci: *Personalisme, Praxis, Partisipasi, Alienasi, Solidaritas, Komunitas*

Abstract

Humans nowadays live in an era of disruption that shakes all aspects of their lives. Advances in information technology is one of the determining factors for disruption. On the one hand, these shocks challenge humans to adapt quickly and unconditionally to all the changes that exist. On the other hand, this disruption erodes, leaves, removes, and ignores human beings who are considered incapable of keeping up with the changing times. This disruption can become a locus philosophicus to deepen the true meaning of humanity. The personalistic principles of Karol Wojtyla (1920-2005), a philosopher, theologian, and pope from Poland, can be used as an analytical method to dissect and answer the challenges of disruption. Moving on from an analysis of actions, Wojtyla sees that technology and its broad impact on human life must never be ignored, pushed aside, or used. Man as a person is the subject of action. Through his actions, he manifests his personality as a person and part of a dynamic human community to achieve personal and collective life goals. In his reflections, he revealed that participation is the key for the person to create a humane community, free from various forms of alienation, even alienation that distances humans from themselves, from their community, and from various currents of changing times.

Keywords: *Personalism, Praxis, Participation, Alienation, Solidarity, Community*

1. Pendahuluan

Disrupsi secara ringkas dipahami sebagai perubahan yang cepat, massif, tak tentu arah, dan mengguncang seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun sosial. Jejak disrupsi dapat ditelusuri sepanjang peradaban manusia.¹¹ Disrupsi saat ini dipacu oleh pertumbuhan cepat teknologi informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti sangat membantu kehidupan manusia dengan berbagai tawaran kemudahan, inovasi, efektivitas, akurasi pertimbangan, efisiensi, dll. Akan tetapi, di sisi lain, peran manusia bagi kehidupannya sendiri sedikit demi sedikit tergantikan, bahkan tersingkir karena kemajuan tersebut. Sedikit demi sedikit, segala bentuk kemampuan manusiawi diambil alih oleh teknologi yang berhasil ia ciptakan. Bahkan, untuk menentukan pilihan-pilihan tindakan, teknologi bisa memberi pertimbangan-pertimbangan terbaik yang cenderung *zero mistake* daripada pertimbangan- pertimbangan manusia yang serba terbatas dalam kuantitas maupun kualitas. Pada akhirnya, hanya orang-orang dengan kemampuan-kemampuan kualitatif dan kuantitatif tertentu saja yang kemudian dapat terus berperan, sedangkan mereka yang tak memiliki kualifikasi memadai mulai tergantikan, tergerus, tersingkir, bahkan mungkin dengan sengaja harus disingkirkan.

Selain itu, kondisi-kondisi alamiah tertentu seperti pandemi Covid-19 dapat pula menjadi pemicu disrupsi ini. Manusia dan masyarakat bisa lolos dari pandemi ini setelah berhasil mengembangkan seperangkat rekayasa teknologi dan perilaku tertentu yang serba baru, terukur dan tersistem. Ketika pandemi ini berangsur-angsur pulih, segala bentuk rekayasa tadi menjadi pola hidup yang baru dan berangsur-angsur menggantikan pola- pola hidup yang lama. Demi kelangsungan hidup di era baru, pola-pola yang lama bisa saja kembali dihidupkan asalkan dimodifikasi sedemikian rupa dengan berbagai penyesuaian yang selaras dengan tuntutan-tuntutan pola-pola hidup yang baru.

¹ Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (London: Profile Books, 1999).

Demikianlah secara umum paradoks disrupsi yang kita alami bersama. Di satu sisi, demi keberlangsungan hidup di era baru, manusia begitu saja mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang begitu cepat, masif, dan tak tentu arah. Hampir semua orang menerima begitu saja kebenaran pandangan bahwa mereka harus

berubah karena jika tidak berubah, mereka akan tersingkir dan terbuang oleh arus zaman. Namun, di sisi lain, manusia sebenarnya menyadari sungguh bahwa telah terjadi guncangan-guncangan di setiap sendi kehidupan yang sering kali terabaikan karena tidak ada ruang dan waktu yang memadai untuk menjadi manusia-manusia kritis dan reflektif di tengah derasnya arus disrupsi ini.

Bertitik tolak dari kenyataan paradoksal itu, bisa diajukan beberapa pertanyaan reflektif filosofis: apakah manusia masih dapat dianggap subjek personal dari tindakannya ketika setiap pilihan dan keputusannya seolah didikte dan dibentuk oleh “subjek” lain yang impersonalistik? Apakah dengan demikian, subjek moral bukan lagi manusia sehingga manusia tidak lagi bisa dituntut bertanggungjawab secara penuh atas pilihan dan keputusan dalam bertindak? Apakah mungkin menuntut pertanggungjawaban moral pada “subjek” lain yang impersonalistik itu? Jika memang manusia masih tetap dipandang sebagai subjek, bagaimana subjek personal ini tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya di tengah arus disrupsi zaman? Pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dirangkum dalam suatu pertanyaan mendasar: siapakah manusia dan bagaimana (tetap) menjadi manusia di tengah arus disrupsi zaman?

Atas pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, perlulah dicari suatu pendekatan yang berupaya memahami manusia secara integral, utuh dan tak-tereduksi. Pada tulisan ini, penulis menawarkan pendekatan personalisme Wojtylian. Karol Wojtyła (1920-2005), yang kemudian dikenal pula sebagai Paus Yohanes Paulus II (1978-2005), adalah seorang Polandia, Katolik dan imam yang sampai akhir hidupnya memusatkan diri pada upaya-upaya menjawab tantangan dehumanisasi pada zamannya dengan menekankan martabat manusia sebagai persona yang utuh dan taktereduksi. Sebagai seorang pemimpin Gereja Katolik, ia memegang prinsip-prinsip kekatolikan, terutama yang tertuang secara gamblang dalam Ajaran Sosial Gereja tentang martabat manusia

sebagai persona. Meskipun demikian, pemikirannya berakar kuat pada pemikiran Aristotelian-Thomistik yang diperkaya oleh analisis fenomenologi realis. Ia tidak hanya menggali dasar-dasar objektif subjek personal, tapi juga mengurai kekayaan dimensi subjektif persona. Ia tidak membahas manusia sebagai persona secara deduktif dari konsep-konsep abstrak sebagaimana yang ditampilkan oleh pendekatan filsafat klasik, melainkan bertitik tolak pada pengalaman manusia yang hidup (*lived-experience of man*). Baginya, pengalaman manusia itu adalah sumber yang paling kaya dan paling mendalam untuk memahami manusia secara integral. Dalam setiap pengalaman, manusia tidak hanya bersinggungan dengan objek di luar dirinya, tapi secara istimewa, ia berhadapan dengan dirinya sendiri sebagai subjek sekaligus objek dari pengalaman itu. Dengan demikian, mencermati pengalaman real kita di tengah derasnya arus disrupsi dalam perspektif Wojtylian ini tentulah akan menarik karena kepersonaan kita akan dapat disingkap.

Di antara pengalaman manusia itu, Wojtyła memilih tindakan sebagai titik tolak analisisnya untuk sampai pada pemahaman yang mendalam tentang manusia sebagai persona. Di balik pilihan itu, Wojtyła memiliki asumsi dasar bahwa tindakan mengungkap siapa itu persona, dan persona yang dimaksud adalah persona sebagai subjek moral yang melalui tindakannya mengaktualkan potensi-potensinya untuk menjadi persona yang secara moral baik.

Dalam makalah ini, penulis akan membatasi diri dengan menelaah arus disrupsi yang dipicu oleh perkembangan teknologi sebagai bagian dari salah satu unsur kebudayaan. Beberapa bagian dari pemikiran Wojtyła tentang kebudayaan itu dapat dicermati dari artikelnya yang berjudul “The Problem of the Constitution of Culture through Human Praxis.”²² Artikel tersebut selaras dengan pemikirannya dalam *Person and Act* dan pandangan Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes*, terutama bagian keenam. Uraianya tentang tindakan persona menjadi dasar pula bagi pembentukan dan pengembangan komunitas melalui tindakan bersama yang ia sebut partisipasi. Solidaritas sebagai bentuk otentik dari partisipasi akan terus mengembangkan persona

² Karol Wojtyła, “The Problem of the Constitution of Culture through Human Praxis,” in Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*, translated by Theresa Sandok (New York: Peter Lang, 1993), 263 – 275.

dan komunitasnya. Melalui solidaritas dalam kerangka partisipasi inilah, Wojtyła mengajak bukan hanya persona individual, tapi komunitas persona untuk mencapai pemenuhan diri sebagai persona sekaligus pada saat yang sama mencapai kebaikan bersama. Secara khusus, pandangan Wojtyła tentang partisipasi disadarinya sebagai bentuk perlawanannya terhadap pemikiran Marxist tentang alienasi.

2. Manusia sebagai Subjek Kebudayaan melalui Tindakannya

Kemajuan teknologi informasi dianggap sebagai salah satu pemicu penting terjadinya disrupsi zaman ini. Teknologi sendiri merupakan salah satu unsur dalam kebudayaan manusia. Wojtyła menegaskan bahwa tindakan manusia (*praxis*) memiliki makna fundamental sebagai elemen konstitutif dari kebudayaan manusia. Pembahasan tentang *praxis* manusia sendiri menjadi salah satu pokok refleksi filosofis sepanjang sejarah filsafat barat mulai zaman Yunani Kuno.³ Secara ringkas, Wojtyła berpegang pada pemahaman klasik Aristotelian-Thomistik dengan analisis fenomenologis yang melawan paham *praxis* dari Marxisme.⁴ Ia meyakini bahwa *praxis*

³ Istilah “*praxis*” sendiri diyakini sudah dipakai dalam pemikiran beberapa filsuf pra-sokratik, namun mendapat penekanan makna yang semakin kuat dalam pemikiran Aristoteles. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan aktivitas manusia dalam tiga bentuk, yakni *praxis* (tindakan), *poiêsis* (produksi), dan *theôria* (kontemplasi). *Praxis* merujuk pada tindakan manusia yang mencapai kepenuhannya ketika tindakan itu teraktualisasikan secara tuntas bagi dan dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, kepenuhan dari *praxis* berada dalam secara internal dalam tindakan yang diaktualkan. *Poiêsis* merujuk pada tindakan yang menjadi tuntas dan penuh ketika menghasilkan produk tertentu sehingga tujuan dari tindakan itu berada di luar subjek tindakan. *Theoria* merujuk pada kontemplasi segala apa yang ada sebagai tindakan paling khas manusia sebagai makhluk berakal budi. *Praxis* dipandang lebih spesifik dan berkeutamaan daripada *poiêsis* karena *praxis* selalu mengarah pada diri sendiri, memperhitungkan sarana-sarana, bukan melulu mengarah pada tujuan di luar dirinya. Dalam *poiêsis*, manusia membutuhkan *technê* atau skill tertentu untuk menghasilkan sesuatu, sedangkan dalam *praxis*, manusia menekankan pentingnya *phronesis* atau kebijaksanaan praktis agar suatu tindakan benar-benar berkualitas. (Lih. Lih. Joel Wainwright, “Praxis,” in *Rethinking Marxism*, 34:1, 44-45, DOI: 10.1080/08935696.2022.2026749; Bdk. Piñeros Glasscock, Juan S. and Sergio Tenenbaum, "Action", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/action/>).

⁴ Refleksi atas *praxis* kemudian menjadi salah satu pemikiran kunci Karl Marx (1818-1883). Ia prihatin dengan kondisi para pekerja di dalam masyarakat kapitalistik. Dalam masyarakat kapitalistik, pekerja, proses kerja dan produk dari kerja dipandang sebagai komoditas yang pada akhirnya kepenuhannya hanya dinikmati oleh para pemilik atau kaum kapitalis. Akibatnya, para pekerja teralienasi dari kerjanya sendiri dan juga hasil kerjanya itu. Dalam hal ini, tak ada gunanya membedakan antara *praxis* dan *poiêsis* karena pada kenyataannya, semuanya, baik pekerja, proses dan produk dikendalikan dan dikuasai oleh kaum kapitalis, bukan para pekerja itu sendiri. Marx memahami *praxis* dalam dua makna. Pertama, ia mengikuti Aristoteles dengan menekankan *praxis* sebagai aktivitas praktis. Baginya, para filsuf materialis gagal memahami aktivitas inderawi ini menjadi basis pengetahuan. Meskipun demikian, ia memperluas makna *praxis* itu untuk menjelaskan relasi-relasi sosial karena dengan menganalisis *praxis* sekaligus pemahaman akan *praxis* ini, kita bisa sampai pada pemahaman akan realitas relasi-relasi sosial. Atas dasar makna pertama ini, Marx kemudian menyusun makna kedua bahwa hanya dengan berpegang pada *praxis* manusia, baik itu tindakan maupun pemahaman atas tindakan tersebut, filsafat dapat menjalankan transformasi sosial dan dengan demikian, dapat memahami maknanya bagi kehidupan manusia. Marx kemudian mengaitkan *praxis*

manusia memiliki dua aspek yang saling terkait, yakni transitif dan intransitif.⁵ Tindakan bermakna transitif sejauh tindakan itu mengarah keluar subjek, mencari ekspresi dan efek dalam dunia luar dan diobjektifkan dalam berbagai bentuk di luar subjek. Pada saat yang sama, tindakan juga bermakna intransitif sejauh tindakan tersebut tinggal tetap di dalam subjek, mendeterminasi kualitas- kualitas atau nilai-nilai imanen subjek, dan secara esensial mencerminkan aspek “kemenjadian” dari subjek tersebut. Karena itu, dalam sebuah tindakan, entah menghasilkan sesuatu entah tidak, manusia tidak hanya mengaktualkan tindakan, tetapi juga membentuk, bahkan dalam arti tertentu menciptakan dirinya sendiri, serta mencapai kepenuhan diri. Dengan kata lain, *praxis* sebenarnya merupakan pengejawantahan atau aktualisasi diri sekaligus pada saat yang sama, membuat realitas yang bukan manusiawi di luar dirinya menjadi lebih manusiawi.⁶ Dari perspektif pengalaman dan fenomenologi inilah, Wojtyła menjelaskan kategori metafisis *actus*, yakni bahwa *actus humanus* merupakan pemenuhan potensialitas-potensialitas manusiawi seseorang.

Mengikuti pendekatan metafisis St. Thomas Aquinas, Wojtyła berpendapat bahwa tindakan mengandaikan manusia sebagai subjek dari tindakan tersebut, bukan sebaliknya. Untuk itu, pemahaman manusia sebagai subjek haruslah tepat, yakni utuh dan tidak- tereduksi. Ia menolak pendekatan epifenomenal⁷, ekonomistik atau

dengan politik revolusioner. Perubahan sosial dan tindakan manusia atau perubahan diri dapat dipahami dan dimengerti secara rasional sebagai praksis revolusioner. Melalui tindakan revolusioner itu, orang bisa menjadi mengerti dirinya sendiri secara berbeda dan mengubah kondisi-kondisi ekonomik. (Wainwright, “Praxis,” 46). Wojtyła memandang bahwa pandangan Marx bertitik tolak pada andaian manusia yang reduktif, yakni perspektif materialistik, ekonomistik, dan kolektivistik.

⁵ Wojtyła, “The Problem of the Constitution of Culture through Human Praxis,” 265-266.

⁶ Wojtyła, “The Problem of the Constitution of Culture through Human Praxis, 266-267.

⁷ Dalam kamus Merriam-Webster versi online, epifenomenal adalah fenomena mental sekunder yang menyertai fenomena lainnya tetapi tidak menjadi penyebab bagi fenomena lain itu. Biasanya, istilah ini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antar fenomena, terutama hubungan antara fenomena mental dan realitas fisis. Misalnya, perilaku seseorang dapat disebabkan oleh otot-otot yang berkontraksi saat menerima impuls-impuls saraf, dan impuls-impuls saraf itu dihasilkan oleh masukan impuls-impuls saraf lain atau dari organ inderawi. Dalam proses perilaku tersebut, dalam pandangan epifenomenalis, peristiwa mental tidak berperan kausatif. Dalam filsafat, muncul kemudian epifenomenalisme, yakni suatu posisi dalam filsafat kesadaran yang meyakini bahwa kondisi atau peristiwa mental disebabkan oleh kondisi atau peristiwa fisis di dalam otak, tapi kondisi atau peristiwa mental tersebut tidak dengan sendirinya menyebabkan sesuatu. Nampak seolah-olah bahwa kehidupan mental kita berakibat pada tubuh kita dan melalui tubuh kita, berakibat pula pada lingkungan di sekeliling kita. Misalnya, nampak bahwa rasa sakit membuat kita meringis, rasa takut membuat jantung kita berdetak lebih cepat, ingatan akan sesuatu yang memalukan membuat kita tersipu-sipu, dll. Akan tetapi, dalam kenyataannya semua hal itu hanyalah hasil dari proses kausal pada tataran fisis. Apa yang membuat kita meringis bukanlah rasa sakit itu, melainkan proses neurofisiologis. Apa yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat bukanlah rasa takut, melainkan kondisi sistem saraf kita yang menyebabkan takut. (Robinson, William, “Epiphenomenalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/epiphenomenalism/>>).

produksionistik sebagaimana yang ditampakkan oleh pendekatan Marxis. Meskipun demikian, Wojtyła menyadari bahwa pendekatannya terhadap tindakan manusia berbeda dengan pendekatan Thomistik. Dalam pendekatan Thomistik, tindakan manusia mengandaikan struktur ontologis dari manusia sehingga pemahaman objektif tentang manusia sebagai persona dalam tindakan diandaikan. Wojtyła tidak cukup puas dengan pendekatan ontologis ini karena pandangan ontologis juga masih bercorak kosmologis, tidak antropologis atau langsung mengacu pada manusia sebagai persona. Ia ingin memahami manusia melalui tindakan karena tindakan menyingkap realitas persona.⁸ Dalam *Person and Act*, ia secara eksplisit mengungkapkan bahwa ia terinspirasi dari pemikiran Maurice Blondel dalam *L'Action* (1893).⁹ Ia berupaya memikirkan dan menginterpretasi ulang pemikiran-pemikiran Aristotelian-Thomistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan jelas tentang siapa itu persona. Ia menjelaskan:

⁸ Karol Wojtyła, *Persona y acción*, diterjemahkan oleh Rafael Mora (Madrid: Ediciones Palabra, 2017), 44. Selanjutnya, referensi ini akan disingkat menjadi PA

⁹ Wojtyła sangat respek terhadap investigasi Blondel dalam *L'Action* (1893) (Lih. PA, 44 note 2; 65 note 2; bdk. Rocco Buttiglione, *Karol Wojtyła: Thought of the Man who Became Pope John Paul II*, Cambridge, U.K.: Wm. B. Eedermans, 1997, 125). Blondel adalah seorang filsuf Prancis beragama Katolik yang memberi pengaruh besar, khususnya bagi gerakan teologi katolik pada awal abad ke-20 yang diberi nama *Nouvelle Theologie*. Sebagai pastor muda yang belajar doktorat di Roma, Wojtyła tertarik pada Blondel karena Blondel secara konsisten berupaya merefleksikan hubungan antara iman dan akal budi, imanensi dan transendensi, kodrati dan adikodrati, pengetahuan dan tindakan serta beragam refleksi lain tentang kehidupan manusia pada zamannya. Blondel secara khusus tertarik untuk mengangkat kompleksitas realitas manusia sebagai suatu totalitas dari dinamisme, hidup dan tindakan. Ia mengkritik filsafat skolastik karena terlalu spekulatif, berbeda dengan filsafat modern yang menurutnya, sedikit demi sedikit memiliki perhatian yang serius pada relasi antara manusia dan tema-tema religiositas. Karena itu, ia ingin memahami esensi iman kristiani melalui pandangan-pandangan Filsafat modern yang berpusat pada realitas manusia. (Juan María Isasi, "Significado de la filosofía de la acción," in Maurice Blondel, *La acción (1893): Ensayo de una crítica de la vida y de la ciencia práctica*, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1996, XLV-LXII; Cesar Izquierdo, "En el centenario de "L'Action" de Maurice Blondel: su influjo en la teología fundamental," in *Scripta Theologica* 26 (1994/2), 713-729).

Pada peringatan 100 tahun publikasi *L'Action*, sebagai Paus Yohanes Paulus II, Wojtyła menulis sepucuk surat kepada Uskup Agung Aix, Prancis, tempat di mana Blondel dulu hidup. Ia menekankan beberapa hal penting. Pertama, ia menyebut bahwa *L'Action* bukan sekedar inspirasi filosofis tapi juga vitamin untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual bagi orang-orang yang ingin mendalami secara serius hidup kristianinya. Kedua, ia menyebut originalitas karya Blondel untuk memahami tindakan manusia dalam beragam dimensinya: individualitas, sosialitas, moralitas, religiositas dan keterkaitan semua dimensi tersebut sehingga dalam tindakan, setiap orang dapat mengekspresikan dirinya, hidup batinnya, dan juga hidupnya di hadapan Allah. Ketiga, ia melihat bahwa di era ketika rasionalisme dan modernitas menggerogoti kekristenan dan mengancam iman, Blondel tetap teguh mempertahankan bahwa di dalam terang tindakan manusia, kita dapat merefleksikan tindakan dan melihat keterkaitan antara misteri rahmat ilahi dan tindakan manusia. Dalam hal ini, Blondel sebagai seorang beriman menggunakan pendekatan filosofis untuk memahami secara mendalam dan percaya pada harmoni antara kodrat dan rahmat, serta akal budi dan iman. Wojtyła sangat menghormati pendekatan filosofisnya sekaligus hidupnya sehingga menjadi teladan nyata bagi orang yang ingin menjadi seorang filsuf yang baik, dan pada saat yang sama, menjadi seorang beriman kristen yang sejati. (Ionnes Paulus PP. II, "Messaggio di Giovanni Paolo a Monsignor Bernard Panafieu, Arcivescovo di Aix, 19 febbraio 1993," diakses dari https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1993/documents/hf_jp-ii_let_19930219_arcpanafieu.html, pada tanggal 29 October 2021, at 23.24 UTC)

“The fact that people, no matter who they are, each and every one of them, and thus as far as possible all of them, become more human – this fact is decisive for the constitution of culture through human praxis. The fact that the various processes of socialization, stimulated by industrialization, production, and consumption, corresponds proportionally to the process of personalization (to again use the language of Gaudium et Spes; see section 6) – this fact is decisive for the constitution of culture through human praxis.” (268)

Karena itu, manusia selalu merupakan tujuan pada dirinya sendiri, dan tak pernah menjadi objek atau sarana dari tindakannya, apalagi dari produk tindakannya itu. Lebih jauh lagi, Wojtyła merujuk gagasan tentang pembedaan antara *being* dan *having* dalam pemikiran Gabriel Marcel. Ia menyebut bahwa manusia sebagaimana adanya lebih berharga untuk diri mereka sendiri daripada untuk apa yang mereka miliki sehingga kebudayaan dibangun melalui *praxis* manusia sejauh melalui *praxis* itu, orang menjadi lebih manusiawi dan tidak hanya memperoleh lebih banyak sarana.

Dari refleksi Wojtyła terhadap *praxis* manusia sebagai aspek konstitutif kebudayaan itu, teknologi sebagai salah satu unsur kebudayaan harus menempatkan manusia-persona sebagai prioritas utama program apapun yang dikembangkannya. Teknologi tidak mungkin memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Sebaliknya, teknologi selalu menjadikan manusia sebagai tujuan, bukan sarana atau objek yang bisa digantikan, diabaikan, atau disingkirkan. Disrupsi yang salah satunya dipicu oleh kemajuan teknologi sangat berpotensi mengabaikan dan menyingkirkan manusia-persona, khususnya mereka yang tidak mampu bertahan atau mengikuti gerak zaman yang serba cepat berubah dan tak terprediksi. Segala upaya yang mereduksi manusia-persona dalam bentuk pendekatan- pendekatan utilitarianistik, materialistik, dan pragmatik, haruslah dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi agar dampaknya tidak menghantam kehidupan manusia. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang integral dan tak-tereduksi tentang manusia-persona sebagai subjek atas tindakan.

Tak kalah penting, tindakan manusia-persona juga dilihat dalam perspektif relasi persona dengan persona lain dalam suatu komunitas tempat mereka hidup dan bertindak bersama. Pemikiran Wojtyła sendiri dipandang memiliki visi personalistik yang berarti menempatkan persona sebagai subjek, baik dalam lingkup tindakannya sendiri maupun tindakannya bersama dengan liyan. Visi ini melampaui individualisme sekaligus kolektivisme yang mereduksi pemahaman tentang manusia sesuai dengan

perspektifnya masing-masing.

3. Manusia-persona sebagai Subjek atas Tindakannya

Jika memang subjek *praxis* adalah manusia-persona dan bahwa manusia-persona ini harus dipahami secara utuh dan tidak reduktif, seperti apakah pandangan Wojtyła tentang manusia? Jika St. Thomas menyatakan bahwa tindakan mengandaikan persona, maka Wojtyła ingin menyingkap realitas persona itu dari analisis tindakan. Jika St. Thomas menyatakan pula bahwa hanya persona saja yang mungkin menjadi subjek tindakan moral, maka Wojtyła pun menunjukkan bahwa dengan mengaktualkan potensialitas-potensialitasnya dalam suatu tindakan, manusia-persona bukan saja menyingkap kepersonaannya, tapi juga menyingkap proses kemenjadiannya (*becoming*) untuk mencapai kepenuhannya yang khas, yakni menjadi persona yang secara moral baik. Ketika menganalisis tindakan tersebut melalui perpaduan perspektif metafisis dan analisis fenomenologi realis, Wojtyła menemukan beberapa elemen konstitutif dalam tindakan seseorang, yakni kesadaran, kebebasan yang terkait dengan *self-determination*, kepenuhan diri (*self-fulfillment*) dan integrasi persona.

3.1. Kesadaran

Wojtyła berbicara tentang kesadaran bukan dalam ranah psikologi atau ilmu-ilmu empirik lainnya, melainkan dalam perspektif filsafat. Ia menyadari bahwa St. Thomas tidak membahas secara gamblang dan hanya menjadikan kesadaran ini bagian dari pembahasan tentang fakultas rasional manusia. Dalam tindakan, menurut Wojtyła, manusia tidak hanya bertindak secara sadar, tetapi “ia sadar akan dua fakta, yakni fakta bahwa ia sedang bertindak dan fakta bahwa dialah yang sedang bertindak.”¹⁰ Kesadaran itu berjalan bersamaan dan menyertai setiap tindakan sadar.

Wojtyła juga secara tegas menolak pandangan subjektivisme modern yang menyatakan bahwa kesadaran adalah fakultas yang berdiri sendiri, suatu kesadaran murni atau *transcendental* yang dipandang sebagai aspek absolut pada manusia yang

¹⁰ PA, 71.

bebas dari segala realitas objektif manusia.¹¹ Baginya, manusia adalah “*conscious being, a being that is not constituted in and through consciousness, but that instead somehow constitutes consciousness.*”¹² Kesadaran memang memainkan peran penting untuk memahami subjektivitas personal dari manusia karena tidak mungkin memahami keterkaitan antara realitas objektif manusia dan interioritas diri (*Self/Ego*) tanpa memperhitungkan kesadaran dan peran utamanya. Menjadi subjek dan mengalami diri sendiri sebagai subjek adalah dua hal yang berbeda, dan kesadaran berperan dalam kedua hal tersebut.¹³

Wojtyła kemudian menguraikan dua lapis fungsi kesadaran manusia, yakni fungsi refleksi sebagaimana cermin, dan fungsi reflexive.¹⁴ Dalam kesadaran itu, segala hal yang dialami, diketahui dan dilakukan oleh seseorang disadari secara penuh bagaikan cermin, dan pada saat yang sama, segala hal itu diinternalisasikan dan dialami secara hidup sebagai miliknya sendiri yang khas, tak terbagikan dan tak mungkin menjadi milik orang lain, termasuk keseluruhan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkannya pada saat itu. Melalui kesadaran inilah, manusia tidak hanya menyadari objek-objek eksternal di luar dirinya, tetapi juga masuk, mengenal dan mengalami secara langsung dan konkret

dirinya sendiri, yakni ke-aku-annya. Pada titik inilah, kesadaran bersama dengan pengetahuan akan diri (*self-knowledge*) membangun subjek aku (*the I*) dan subjektivitasnya. Dengan kata lain, kesadaran inilah yang membuat manusia-persona tidak hanya menyadari apa yang ia lakukan, tapi juga secara lebih fundamental, ia dapat menyadari, mengenali dan mengalami interioritasnya. Bahkan, ia menambahkan bahwa melalui kesadaran ini pula, manusia mengalami nilai-nilai moral yang terkait dengan tindakan-tindakan karena ia menyadari bahwa dirinya subjek dari tindakan itu dan mengalaminya secara langsung dan tak-terulang.¹⁵

¹¹ Karol Wojtyła, “Thomistic Personalism,” in Karol Wojtyła, *Person and Community*, 170.

¹² Karol Wojtyła, “The Person: Subject and Community,” in Karol Wojtyła, *Person and Community*, 226.

¹³ Wojtyła, “The Person: Subject and Community,” 227, 231-232; Juan Manuel Burgos, “La antropología personalista de persona y acción,” in Burgos, J.M., (ed.), *La filosofía personalista de Karol Wojtyła* (Madrid: Ediciones Palabra, 2007), 128; Miguel Acosta and Adrian J. Reimers, *Karol Wojtyła’s Personalist Philosophy: Understanding Person and Act* (Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2016), 131-132.

¹⁴ PA, 73; Wojtyła, “The Person: Subject and Community,” 227.

¹⁵ PA, 97-98.

3.2. *Self-determination* dan Kebebasan

Meskipun merupakan aspek penting dalam tindakan, kesadaran tidak pernah membentuk tindakan karena tindakan hanya dibentuk oleh kehendak yang merupakan fakultas khas persona. Wojtyła menyebut dua karakter khas kehendak, yakni intensionalitas dan *self-determination*.¹⁶ Kehendak berkarakter intensional nampak dalam pengalaman seseorang yang menghendaki sesuatu di luar dirinya. Dalam situasi tersebut, kehendak mengarahkan subjek-persona menuju objek tertentu, baik objek material, orang lain, nilai maupun tujuan-tujuan yang dikehendaknya. Dalam pemahaman ini, kehendak bertindak sebagai fakultas yang menjadi sumber utama tindakan manusia. Wojtyła menyebut gerak kehendak ini sebagai transendensi horizontal.

Selain transendensi horizontal, kehendak juga mampu merealisasikan transendensi vertikal, yakni ketika kehendak berperan sebagai *self-determination*. Ketika seseorang menginginkan sesuatu di luar dirinya, pada saat yang sama, ia mendeterminasi dirinya sendiri sebagai subjek yang berkehendak.¹⁷ Pada titik inilah, persona bertanggungjawab pada semua pilihan, keputusan dan tindakannya. Kehendak sebagai *self-determination* ini mengandaikan bahwa seseorang memiliki sekaligus dimiliki oleh dirinya sendiri (*self-possession*) dan memerintah sekaligus diperintah oleh dirinya sendiri pula (*self-governance*). *Self-possession* dan *self-governance* ini adalah struktur personal setiap orang. Melalui *self-determination* ini, subjek tidak mengarah keluar dirinya menuju objek eksternal, tapi justru masuk ke dalam diri dan menjadikan diri sendiri subjek sekaligus objek pertama dari kehendaknya.

Pemahaman akan *self-determination* ini terkait erat dengan paham Wojtylian akan kebebasan. Momen kebebasan nampak dalam pengalaman “aku bisa, tapi aku tidak harus.”¹⁸ Kebebasan dalam arti penuh, bagi Wojtyła yang berpegang teguh pada doktrin

¹⁶ Karol Wojtyła, “Personal Structure of the Self-Determination,” in Karol Wojtyła, *Person and Community*, 189; Deborah Savage, *The Subjective Dimension of Human Work: The Conversion of the Acting Person according to Karol Wojtyła/John Paul II and Bernard Lonergan* (New York: Peter Lang, 2008), 136.

¹⁷ PA, 174-181.

¹⁸ PA, 169.

tomistik, selalu berkaitan erat dengan kebenaran dan kebaikan karena pada dasarnya, kehendak sebagai salah satu fakultas manusia memiliki keterkaitan erat pula dengan fakultas lain, yakni akal budi.¹⁹

3.3. Kepenuhan diri (*Self-fulfillment*)

Ketika terealisasi secara penuh, tindakan memmanifestasikan ekterioritas sekaligus interioritas manusia, sisi transitif sekaligus intransitif. Wojtyła memang lebih fokus pada dimensi interioritas dan intransitif karena memang ia sedang menganalisis tindakan yang dapat menyingkap aspek-aspek ke-persona-an seseorang daripada buah atau produk objektif yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Tidak hanya itu, ketika tindakan terealisasikan, manusia pun menjadikan dirinya baik atau buruk secara moral.²⁰

¹⁹ Dalam tradisi tomistik, intelek atau akal budi dan kehendak sama-sama bertindak secara intensional meskipun intensionalitas masing-masing berbeda karakter. Dalam pengalaman, orang secara mudah membedakan antara “Aku mengetahui sesuatu” dan “Aku menginginkan sesuatu”. Pembedaan ini penting karena juga menyingkap keterkaitan keduanya. Dalam tradisi tomistik, tindakan intensional akal budi membuat objek dengan cara tertentu dikenal oleh subjek sehingga objek menjadi eksis dalam subjek sebagai objek intensional. Sedangkan, dalam tindakan intensional kehendak, St. Thomas menyebut bahwa subjek diarahkan secara intensional menuju objek sehingga subjek eksis secara intensional, bukan secara natural atau secara nyata, pada objek.

Kehendak terkait dengan akal budi sehingga secara tidak langsung tunduk pula pada kebenaran, terutama kebenaran akan kebaikan. Dalam setiap pengalaman “menginginkan sesuatu,” seseorang menginginkan sesuatu yang telah ia kenal yang dalam tradisi tomistik dinyatakan dalam ungkapan “nihil volitum nisi praecognitum” (tidak satupun dikehendaki jika tidak diketahui sebelumnya). Menurut Wojtyła, akal budi yang berisikan pengetahuan dan pengetahuan akan diri (*self-knowledge*) mengarahkan kehendak yang memungkinkan, baik transendensi horisontal maupun vertikal, mengarahkan diri pada kebenaran tentang kebaikan. Secara spesifik, ia mengungkapkan bahwa pengetahuan mengantar kehendak sebagai intensionalitas menuju objek real, sedangkan *self-knowledge* mengantar kehendak sebagai *self-determination* pada aktualisasi objektifikasi, yakni menjadikan diri sendiri objek pertama dan terdekat bagi kehendak.

Ketika tunduk pada kebenaran, menurut tradisi Thomistik, kehendak memerankan diri sebagai *appetitus rationalis*. Kehendak mengarahkan dirinya sendiri untuk memilih dan memutuskan sesuatu di antara sekian banyak objek yang tersedia, dan kebenaran menjadi kondisi utama pada momen pemilihan dan keputusan karena kehendak tunduk pada kebenaran akan kebaikan. Meskipun demikian, manusia dapat jatuh dalam kekeliruan karena bisa jadi, ia memilih sesuatu yang salah, tapi tetap membuat keputusan terkait hal itu, bahkan meskipun ia tahu bahwa hal itu salah. Manusia kadang-kadang secara langsung memilih sesuatu yang buruk, baik itu hal yang secara aktual buruk atau sesuatu yang nampaknya saja baik tetapi sebenarnya buruk. Pengalaman-pengalaman tersebut sama sekali tidak menegasi kenyataan bahwa kehendak selalu terkait pada kebenaran tentang kebaikan.

Lebih lanjut, Wojtyła juga berpikir bahwa dalam pengalaman akan nilai, kebenaran memainkan peranan yang penting. Sebagai contoh, kita mengalami nilai-nilai dari beberapa makanan, misalnya terkait nutrisinya, pada saat yang bersamaan, kita tahu secara pasti apa yang baik bagi kita pada objek yang real, konkret dan benar di hadapan kita, yakni makanan-makanan itu. Karena itu, Wojtyła menegaskan bahwa dalam setiap pengalaman akan nilai, subjek juga mengenal secara intuitif kebenaran dari objek kehendak tersebut. (Lih. PA, 216-220; Karol Wojtyła, “Human Nature as the Basis of Ethical Formation,” in Karol Wojtyła, *Person and Community*, 97-98; bdk. Jaroslaw Kupczak, *Destined to Liberty: The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II*, (Washington D.C.: The Catholic University of America Press, 2000), 118-119)

²⁰ PA, 229-230.

Dengan demikian, moralitas pertama-tama dipandang sebagai realitas eksistensial dan realitas instrinsik dalam tindakan, bukan realitas normatif atau aksiologis di luar manusia. Jika realisasi tindakan itu benar-benar mengantar manusia pada pemenuhan dirinya, maka ia pun akan mencapai kebahagiaan (*felicity*). Karena itu, kebahagiaan merupakan kondisi interior seseorang dan identik dengan pencapaian pemenuhan diri seseorang dalam dan melalui tindakan.²¹

3.4. Integrasi Persona

Manusia-persona bukan hanya terdiri dari aspek-aspek yang memungkinkannya melakukan transendensi, baik horizontal maupun vertikal. Dengan kata lain, manusia bukan hanya makhluk spiritual yang mampu berpikir dan berkehendak. Menurut Wojtyła, tindakan pada kenyataannya tidak hanya memanifestasikan transendensi, tapi juga integrasi persona. Dalam tindakan, integrasi persona itu nampak dengan hadirnya pula pengalaman akan tubuh (*soma*) dan daya jiwani (*psikhe*) yang menyertai daya spiritualitas manusia (kehendak dan akal budi). *Soma* memiliki dinamika yang khas dan menampakkan bahwa manusia benar-benar organisme yang secara umum bereaksi pada berbagai stimulus. Sebagian kecil dinamika somatik berada dalam pantauan kesadaran, sedangkan sebagian besar benar-benar bebas dari pengaruh kesadaran. Demikian pula, *psikhe* pun memiliki dinamika yang khas dan bersifat emotif. Emosi-emosi ini pun terkait dengan *soma* dan saling memengaruhi satu sama lain. Secara khusus, emosi-emosi juga terkait dengan kesadaran, bahkan bisa pula secara langsung memengaruhi kesadaran. Dalam pengalaman tindakan, orang pun sering menyadari bahwa dinamika emosionalnya berpengaruh, baik pada *soma* maupun daya-daya spiritual. Hal itu menjadi bukti eksperiensial dan eksistensial bahwa ada kesatuan antara ketiga aspek manusia-persona meskipun kesatuan itu tak pernah bisa dijelaskan secara empirik ataupun fenomenologis, kecuali dengan menggunakan pendekatan metafisika.²²

²¹ PA, 260.

²² PA, 372.

Uraian Wojtyła tentang keseluruhan dimensi transendental dan integrasi persona dalam tindakan memberi penegasan betapa kompleks dan kaya realitas manusia-persona dalam objektivitas sekaligus subjektivitasnya. Ia jeli sekali memotret setiap sisi eksterior dan interior manusia-persona dalam tindakan tanpa jatuh pada uraian detil seperti pada uraian ilmu-ilmu empirik. Ia benar-benar berupaya menyingkap pemahaman tentang manusia-persona yang utuh dan tidak-dapat-direduksi. Terlepas dari apa pun produk yang dihasilkan oleh suatu tindakan, manusia-persona yang menjadi subjek dari tindakan tetaplah harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Tidak ada, atau mungkin belum ada, satu pun produk teknologi yang mampu menduplikasi keseluruhan kompleksitas dan kekayaan manusia-persona. Robot humanoid, misalnya, mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan yang melampaui kemampuan manusia di berbagai dimensi. Meskipun demikian, produk teknologi tercanggih itu belum bisa menampakkan transendensi sekaligus integrasi manusia-persona dalam tindakan-tindakannya. Teknologi mungkin bisa menggantikan manusia-persona dalam kapasitas-kapasitas tertentu, tapi tidak pernah mampu menggantikan keseluruhan kompleksitas dan integralitas potensial manusia.

Dengan cara pandang yang sama, disrupsi memang mengguncang dan mengubah keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Akan tetapi, disrupsi tidak pernah mungkin menghilangkan manusia-persona. Meskipun demikian, kita perlu melihat bahwa disrupsi tetap suatu tantangan terhadap kemanusiaan. Tantangan ini tidak mungkin hanya diatasi oleh setiap manusia-persona secara individual. Ada sekian banyak manusia-persona yang secara nyata eksistensinya sebagai manusia terancam, tersingkir, dan terabaikan. Karena disrupsi ini, banyak manusia teralienasi, baik dari dirinya sendiri, lingkungan sosialnya maupun dari dunia. Karena itu, tantangan kemanusiaan ini juga perlu dihadapi oleh manusia-persona dengan liyan dalam suatu komunitas yang manusiawi.

4. Manusia-Persona sebagai Subjek Partisipasi melawan Alienasi

4.1. Dimensi Intersubjektif dalam Korelasi Dinamis Persona dan Tindakan

Pada bagian akhir dari bukunya *Person and Act*, Wojtyła melanjutkan refleksinya dengan menyinggung dimensi intersubjektif pada manusia-persona. Ia tidak bermaksud masuk dalam suatu teori sosial tentang komunitas dalam perspektif sosiologis ataupun filsafat sosial. Ia tetap fokus merefleksikan tema utamanya, yakni korelasi dinamis antara manusia-persona dan tindakan. Ia bertitik tolak dari pengalaman nyata bahwa manusia-persona hidup, eksis dan bertindak bersama dengan manusia-persona yang lain atau liyan. Ia percaya bahwa relasi manusia-persona dengan liyan akan memperkaya pengalaman dan dengan cara tertentu membentuk dirinya sendiri. Sebagai seorang filsuf Thomistik, Wojtyła tetap berpegang pada pandangan bahwa manusia-persona adalah realitas substansial, sedangkan relasi antar manusia adalah aksidens, bukan sebaliknya. Dengan kata lain, ia menegaskan posisi filosofisnya yang mendukung primasi manusia-persona atas komunitas atau *societas*.²³

Wojtyła memahami relasi antara Aku dan liyan dalam dua kondisi kognitif yang terkait.²⁴ Pertama, ada fakta tentang eksistensi dan tindakan dari seseorang yang adalah Aku, yang secara nyata hidup, eksis dan bertindak bersama dengan liyan. Kedua, ada fakta tentang liyan yang hidup, eksis dan bertindak bersama dengan Aku sebagai seseorang yang lain atau salah satu dari semua orang di luar diriku. Liyan, termasuk seluruh umat manusia, merujuk pada seseorang yang secara eksperensial dan aktual terhubung dengan Aku. Aku tidak bisa menyadari dan mengalami liyan sebagaimana Aku menyadari dan mengalami diriku sendiri, demikian juga sebaliknya. Meskipun demikian, Aku bisa tetap menyadari dan mengalami liyan sebagai seseorang yang secara eksperensial berbeda denganku, tetapi terhubung denganku. Dengan deskripsi tersebut, Wojtyła hendak menunjukkan bahwa pokok bahasan relasi intersubjektif

²³ Primasi manusia-persona terhadap komunitas, menurut Wojtyła, harus dipahami tidak hanya secara metafisis, tetapi juga secara metodologis. Primasi ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang hidup, eksis dan bertindak bersama pada kenyataannya adalah multipisitas atau kumpulan dari subjek-subjek personal yang merujuk pada realitas koeksistensial dan kooperatif dalam perspektif personalistik. Orang-orang itu bukan realitas substansial karena berasal dari realitas substansial yang sejati, yakni manusia-persona (bdk. PA, 383; Wojtyła, "The Person: Subject and Community," 236-237)

²⁴ Karol Wojtyła, "Participation or Alienation?" in Karol Wojtyła, *Person and Community*, 198-202.

bukan sekedar bahasan tentang Aku, liyan dan relasi antara Aku-liyan saja, melainkan juga bagaimana masing-masing Aku berbagi pengalaman sebagai subjek-subjek personal yang hidup, eksis, dan bertindak bersama-sama. Liyan, bagiku, bukanlah seseorang yang sekedar berada di dekatku, melainkan pertama-tama, adalah seseorang atau persona yang sama denganku, yang terhubung denganku dalam hidup, eksistensi dan tindakan bersama. Ketika Aku mengalami liyan sebagai Aku-yang-lain, Aku mungkin semakin dekat dengannya untuk mengenali dirinya sebagai Aku-yang-lain yang juga unik dan tak-terbagi seperti diriku. Gagasan relasi antara Aku dan Aku-yang-lain ini membuka peluang kemungkinan partisipasi dalam kemanusiaan liyan.

Dari gagasan mendasar itu pula, Wojtyła membahas dua dimensi utama komunitas manusiawi, yakni dimensi interpersonal dan dimensi sosial.²⁵ Dimensi interpersonal merujuk pada relasi Aku-Kamu (*I-Thou relationship*), sedangkan dimensi sosial menyingkap realitas relasi Kami/Kita (*We relationship*). Keduanya tidak terpisahkan dan harus dipahami dalam kerangka analisis Wojtylian tentang korelasi dinamis persona dan tindakan.

4.2. Teori Partisipasi

Wojtyła lebih lanjut menjelaskan dimensi intersubjektif tindakan manusia-persona dalam teori partisipasi. Istilah partisipasi memiliki beragam makna dalam sejarah pemikiran filsafat dan teologi.²⁶ Dalam bahasa sehari-hari, partisipasi diartikan sebagai tindakan “berbagi atau ambil bagian dalam suatu kegiatan,” misalnya seseorang berpartisipasi dalam pemilu atau lomba cerdas cermat. Bagi Wojtyła, partisipasi secara ringkas dipahami dalam kerangka tindakan bersama yang melaluinya setiap persona yang terlibat memanasifestasikan seluruh nilai personalistiknya (kesadaran, kebebasan dalam kerangka self-determination, self-fulfillment, integrasi persona), mencapai kepenuhannya sendiri, sekaligus kepenuhan bersama, yakni kebaikan bersama. Dengan menyingkap akar fundamental dari tindakan bersama ini, Wojtyła menegaskan bahwa partisipasi merupakan karakter terdalam dan sama dalam diri setiap persona yang

²⁵ Wojtyła, “The Person: Subject and Community,” 236-258.

²⁶ PA, 389; bdk. Sergio Lozano Arco, *La interpersonalidad de Karol Wojtyła* (Valencia: Edicep, 2016), 78-80 (dengan endnotes halaman 152-155)

hidup, eksis dan bertindak bersama dengan liyan. Karakter ini bukanlah sesuatu yang abstrak, tapi benar-benar termanifestasikan dalam realisasi tindakan bersama manusia-persona dan liyan yang juga adalah realisasi nilai-nilai personalistik masing-masing persona.²⁷

Menurut Wojtyła, partisipasi juga merupakan faktor konstitutif bagi komunitas manusia.²⁸ Dalam komunitas tersebut, setiap manusia-persona memainkan perannya dalam tindakan bersama yang berbeda dengan tindakan personal. Konsekuensinya, tindakan bersama dengan liyan dalam komunitas, mengarahkan kita pada fakta bahwa nampaknya ada subjektivitas baru dari tindakan bersama. Wojtyła menyebut subjektivitas macam itu sebagai “quasi-subjek”²⁹ karena komunitas pada dasarnya bukanlah realitas substansial, melainkan realitas aksidental yang memmanifestasikan relasi-relasi manusia. Realitas dan subjek substansialnya tetaplah manusia-persona itu sendiri.

4.3. Kebaikan Bersama

Hubungan antara partisipasi dan komunitas menjadi semakin jelas dalam konsep kebaikan bersama karena komunitas secara esensial dibentuk atas dasar kebaikan bersama tertentu. Secara sederhana, kebaikan bersama berarti kebaikan komunitas yang dalam perspektif etika dan aksiologi merupakan sasaran atau tujuan dari tindakan bersama dalam komunitas. Wojtyła memberi penekanan baru, dengan berkata:

“... we see that the common good does not consist solely in the goal of the common acting performed by a community or group; indeed, it also, or even primarily, consists in that which

²⁷ PA, 390-393.

²⁸ Wojtyła mengembangkan idenya tentang komunitas dalam artikel “*The Person: Subject and Community*,” dengan menyebut dua dimensi esensial, yakni dimensi interpersonal dan dimensi sosial komunitas. Dengan menegaskan adanya dua dimensi itu, Wojtyła menolak memandang komunitas sebagai sekedar suatu unit material dari sekumpulan orang yang hidup dan bertindak bersama. Komunitas bukanlah sekedar sekumpulan orang, tapi serangkaian relasi antar subjek-persona yang hidup dan bertindak bersama dan bahwa subjek utama dari komunitas itu adalah masing-masing manusia-persona di dalamnya. Dengan demikian, menurut Burgos, Wojtyła menguraikan bukan hanya dimensi objektif, melainkan juga dimensi intersubjektif komunitas. Hanya dalam perspektif personalistik, kita bisa sampai pada pemahaman tentang komunitas manusiawi yang otentik. (Lih. Wojtyła, “*The Person: Subject and Community*,” 241-248; Bdk. Juan Manuel Burgos, *Para comprender a Karol Wojtyła* (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2014), 71; Cf. Juan Manuel Burgos Velasco, “El personalisme de Karol Wojtyła: persona, prójimo, comunidad, sociedad,” in *Horyzonty Polityki* Vol. 7, No. 19 (2016), 25-26; Bdk. Julia Urabayen, “Emmanuel Lévinas y Karol Wojtyła: Dos comprensiones de la persona y una misma defensa del ser humano,” in *Persona y Derecho*, Vol. 56*(2007), 409-442; Bdk. Josep M. Coll, “Karol Wojtyła entre las filosofías de la persona y el personalismo diálogo,” in Juan Manuel Burgos (ed.), *La filosofía personalista de Karol Wojtyła*, 212-220)

²⁹ PA, p. 400; bdk. Buttiglione, *Karol Wojtyła*, p. 171.

conditions and somehow initiates in the persons acting together their participation, and thereby develops and shapes in them a subjective community of acting."³⁰

Dengan kata lain, Wojtyła ingin memasukkan bukan hanya karakter objektif, melainkan juga karakter subjektif dalam gagasan kebaikan bersama karena pada dasarnya yang bertindak bersama untuk mencapai kebaikan bersama adalah subjek-subjek persona. Kebaikan bersama benar-benar menjadi tujuan komunitas sejauh kebaikan bersama itu menciptakan kondisi yang penting dan perlu di mana setiap persona di dalam komunitas itu dapat hidup, eksis dan bertindak bersama.

Karena ada berbagai tipe konfigurasi sosial yang membentuk komunitas, kebaikan bersama pun sebenarnya adalah konsep yang analogis sesuai dengan konteks penggunaannya, misalnya kontes keluarga, etnis, bangsa, atau negara. Semakin eksistensial ikatan persona dalam komunitas, semakin mendalam dan konkret bentuk kebaikan bersama yang ingin dituju melalui tindakan bersama. Dengan memasukkan pula dimensi subjektif dalam kebaikan bersama, tentu saja pencapaiannya melalui tindakan-tindakan bersama membutuhkan sinkronisasi dan harmoni antar persona di dalamnya sehingga masing-masing persona benar-benar mengaktualkan partisipasi di dalam komunitas. Dalam sinkronisasi dan harmoni tersebut, tindakan berkorban demi komunitas bisa dipandang sebagai bentuk tindakan personal yang konkret dan bermakna sejauh pengorbanan tersebut benar-benar memanifestasikan nilai-nilai personalistik seseorang.

4.4. Solidaritas

Dalam hubungan antara partisipasi dan kebaikan bersama, Wojtyła mencatat beberapa sikap otentik dan non-otentik. Sikap otentik menampilkan disposisi dan perilaku manusia-persona yang selalu dan secara konstan siap untuk mengaktualkan kemampuan partisipasi dengan memanifestasikan nilai-nilai personalistiknya secara utuh dalam dan melalui tindakan bersama untuk mencapai kebaikan bersama dalam komunitas. Kesiapsediaan itulah yang disebut oleh Wojtyła sebagai solidaritas. Kesiapsediaan itu muncul dari pilihan dan keputusan bebas masing-masing pribadi

³⁰ PA, 405.

untuk bersama-sama mencapai kebaikan bersama. Hanya saja, kesiapsediaan itu tidak selalu diekspresikan dengan cara yang sama. Wojtyła menyebut kesiapsediaan yang mengambil jalan berbeda sebagai sikap otentik oposisi. Solidaritas dan oposisi memiliki semangat dasar yang sama, yakni kesiapsediaan untuk terlibat secara penuh dalam tindakan-tindakan bersama demi tercapainya kebaikan bersama. Untuk harmoni antara solidaritas dan oposisi, Wojtyła menambahkan semangat dasar dialog di antara semua anggota komunitas, baik yang memilih jalan yang sama maupun jalan berbeda, demi kepenuhan kebaikan bersama.

Di samping sikap otentik, Wojtyła menyebut sikap non-otentik yang tercermin dalam perilaku konformis dan keengganan untuk terlibat. Orang-orang yang konformis biasanya taat pada peraturan dan kebiasaan, atau sekurang-kurangnya terus berupaya beradaptasi dengan peraturan atau kebiasaan bersama itu. Akan tetapi, mereka tidak sungguh-sungguh terlibat karena tidak secara gamblang memmanifestasikan nilai-nilai personalistiknya dalam tindakan bersama. Sedangkan, perilaku enggan terlibat tentu jauh lebih ekstrim lagi. Mereka yang enggan terlibat biasanya menarik diri dalam sebagian atau bahkan semua tindakan bersama yang diarahkan untuk mencapai kebaikan bersama.

4.5. Partisipasi dan Alienasi

Wojtyła sadar bahwa setiap manusia-persona bisa menjadi anggota dari lebih dari satu komunitas, sedangkan masing-masing komunitas tentu memiliki kekhasan sekaligus kekayaan yang unik. Karena itu, bentuk partisipasi pun beragam dan khas, begitu pula kebaikan bersama yang hendak dicapai. Partisipasi dan kebaikan bersama dalam komunitas tertentu bisa jadi berbeda bahkan bertentangan dengan partisipasi dan kebaikan bersama pada komunitas lain. Partisipasi yang sejati, menurut Wojtyła, adalah partisipasi yang bisa menembus kemanusiaan liyan tanpa sekat atau tanpa batas. Dengan demikian, kemanusiaan bukan dipahami dalam kerangka abstrak, namun kemanusiaan yang konkret dalam diri liyan tanpa memandang sekat-sekat yang serba membatasi. Partisipasi yang semacam ini, bagi Wojtyła, adalah perlawanan terhadap

alienasi yang dalam arti tertentu diartikannya sebagai antitesis dari partisipasi.³¹

Dengan menyebut alienasi sebagai antitesis dari partisipasi, Wojtyła melampaui gagasan Marx tentang alienasi yang hanya terbatas pada dimensi kerja dalam kerangka material dan ekonomistik. Alienasi semacam itu mungkin mampu memberi gambaran tentang krisis dehumanisasi yang disebabkan oleh perubahan sosial akibat beragam faktor eksternal manusia sehingga solusi yang ditawarkan untuk melawan alienasi dengan membangun sistem sosial baru tidaklah menyentuh akar fundamental dari problem alienasi, yakni partisipasi.³² Wojtyła menyebut setidaknya tiga makna alienasi, yakni alienasi sebagai antitesis partisipasi, sebagai suatu imposibilitas untuk meraih self-fulfillment dalam dimensi interpersonal dan sosial komunitas, serta sebagai kondisi-kondisi yang menghalangi atau membatalkan kemungkinan seseorang mengalami liyan sebagai seorang Aku-yang-lain.

Dalam kerangka teori partisipasi ini, Wojtyła menyadari sungguh pentingnya aktualisasi kodrat sosial manusia yang direalisasikan dalam dan melalui hidup, eksis dan bertindak bersama liyan yang pada dasarnya adalah Aku-yang-lain. Sikap solidaritas dan oposisi yang disemangati oleh prinsip dialog adalah pilihan sikap yang lebih rasional dan mungkin diwujudkan meskipun tidak pernah mudah daripada sikap konformis dan keengganan untuk terlibat. Sikap-sikap otentik dalam partisipasi memang merupakan pilihan dan keputusan bebas masing-masing persona, namun berdasarkan analisis pengalaman bertindak dalam perspektif personalistik Wojtylian ini, pengalaman akan kebenaran nilai-nilai solidaritas ataupun dialog akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi setiap persona ketika memilih dan memutuskan bagaimana dia akan bersikap dalam partisipasi. Karena itu, betapa pentingnya pula karakter komunitas tempat masing-masing manusia-persona dapat menghidupi partisipasi melalui sikap-sikap otentiknya. Pada titik inilah, partisipasi adalah karakter manusia-persona sekaligus tugas yang terus menerus perlu diaktualisasikan.

5. Kesimpulan

³¹ PA, 424; Wojtyła, "The Person: Subject and Community," 237-238, 255.

³² Bdk. Lozano Arco, *La interpersonalidad en Karol Wojtyła*, 289.

Disrupsi sebagai pengalaman real benar-benar telah mengguncang seluruh sendi kehidupan manusia. Salah satu pemicu disrupsi adalah kemajuan teknologi informasi yang sedemikian cepat dan merebak luas. Hampir semua orang terdampak olehnya dan “dipaksa” untuk menyesuaikan diri di dalamnya. Situasi ini dapat dipandang sebagai tantangan yang menghambat kemanusiaan, tapi sekaligus peluang besar untuk merefleksikan kembali dasar-dasar kemanusiaan. Dalam situasi seberat apa pun, tak pernah manusia bisa disingkirkan, dihambat, digantikan, atau dianggap sebagai objek, alat, atau sarana bagi apa atau siapa pun.

Perspektif personalisme Wojtylian menekankan prioritas manusia yang secara kodrati adalah persona sebagai subjek dari tindakannya, baik secara individual maupun secara sosial. Teknologi sebagai salah satu unsur dalam kebudayaan adalah produk dari tindakan manusia-persona, dan produk tak pernah lebih penting dan utama daripada manusia-persona sebagai subjek dari tindakan. Guncangan terhadap sendi-sendi kehidupan yang terjadi di era disrupsi ini memang berpotensi mengabaikan kemanusiaan, maka manusia-persona sebagai subjek atas tindakannya dan tindakan bersama liyan perlu mengembangkan partisipasi melalui sikap-sikap otentik solidaritas dan dialog demi kebaikan bersama.

Tantangan disrupsi terhadap kemanusiaan tidak akan pernah berhasil jika bertitik tolak dari ideal-ideal individualisme-liberal atau kolektivisme. Penguatan komunitas partisipatif dengan semangat solider dan dialogis kiranya menjadi pilihan dan keputusan yang rasional dan mungkin, meskipun tidak pernah mudah. Solidaritas kemudian perlu diekspresikan secara konkret dalam tata sosial yang manusiawi bagi semua orang. Tata sosial baru yang manusiawi itu harus selalu terbuka pada partisipasi semakin banyak orang sehingga semakin banyak orang yang dapat memantapkan nilai-nilai personalistiknya, meraih kepenuhan diri sekaligus mencapai kebaikan-kebaikan bersama. Prinsip dialog juga perlu dihidupkan agar tata sosial yang baru pun tidak jatuh pada sistem impersonalistik yang menciptakan alienasi-alienasi baru.

Apakah dengan demikian visi personalistik Wojtyła tentang manusia-persona dan komunitas manusiawi sesuatu yang utopis? Wojtyła menyatakan bahwa secara kodrati ke-persona-an memungkinkan terwujudnya manusia-persona yang bertindak

untuk mencapai kebahagiaannya sekaligus berpartisipasi pada kemanusiaan konkret sesamanya. Hal yang sulit diwujudkan tidak selalu berarti utopis sehingga tidak layak diperjuangkan. Karena itu, setiap tindakan persona yang diarahkan pada kepenuhan diri sekaligus kepenuhan kebaikan bersama dalam suatu komunitas manusiawi tetap layak untuk diperjuangkan.

Daftar Pustaka

- Acosta, Miguel, and Adrian J. Reimers. 2016. *Karol Wojtyła's Personalist Philosophy: Understanding Person and Act*. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
- Arco, Sergio Lozano. 2016. *La interpersonalidad de Karol Wojtyła*. Valencia: Edicep.
- Burgos, Juan Manuel. 2007. «La antropología de persona y acción.» dalam *La filosofía personalista de Karol Wojtyła*, diedit oleh Juan Manuel Burgos. Madrid: Ediciones Palabra.
- . 2014. *Para comprender a Karol Wojtyła*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- . 2016. «El personalismo de Karol Wojtyła: persona, prójimo, comunidad, sociedad.» *Horyzonty Polityki* 7 (19). doi:10.17399-HP.2016.071901.
- Buttiglione, Rocco. 1997. *Karol Wojtyła: Thought of the Man who Become Pope John Paul II*. Cambridge, UK: B. Eedermans.
- Coll, Joseph M. 2007 «Karol Wojtyła entre las filosofías de la persona y el personalismo diálogo.» dalam *La filosofía personalista de Karol Wojtyła*, diedit oleh Juan Manuel Burgos. Madrid: Ediciones Palabra.
- Fukuyama, Francis. 1999. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. London: Profile Books.
- Ioannes Paulus PP II. 1993. «Messaggio di Giovanni Paolo a Monsignor Bernard Panafieu, Arcivescovo di Aix.» www.vatican.va. 19 de February. Diakses dari https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1993/documents/hf_jp-ii_let_19930219_arc-panafieu.html, pada tanggal 29 de October de 2021.
- Isasi, Juan Maria. 1996. «Significado de la filosofía de la acción.» dalam Maurice Blondel. *La acción (1893): Ensayo de una crítica de la vida y de la ciencia práctica*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
- Izquierdo, Cesar. 1994. «En el centenario de "L'action" de Maurice Blondel: su influjo en la teología fundamental.» *Scripta Theologica* 26 (2): 713-729.
- Kupczak, Jaroslaw. 2000. *Destined to Liberty: The Human Person in the Philosophy of Karol Wojtyła/John Paul II*. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press.
- Piñeros Glasscock, Juan S. and Sergio Tenenbaum, "Action", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/action/>>.

Savage, Deborah. 2008. *The Subjective Dimension of Human Work: The Conversion of the Acting Person according to Karol Wojtyła/John Paul II and Bernard Lonergan*. New York: Peter Lang.

Urabayen, Julia. 2007. «Emmanuel Lévinas y Karol Wojtyła: Dos comprensiones de la persona y una misma defensa del ser humano.» *Persona y Derecho* 56.

Wainwright, Joel. 2022. «Praxis.» *Rethinking Marxism* 34 (1): 41-62. doi:10.1080/08935696.2022.2026749.

Wojtyła, Karol. 1993. «Human Nature as the Basis of Ethical Formation.» dalam Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*. Diedit oleh Theresa Sandok. New York: Peter Lang, 95-99

—. 1993. «Participation or Alienation?» dalam Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*. Diterjemahkan oleh Theresa Sandok. New York: Peter Lang, 197- 207.

—. 1993. «Personal Structure of the Self Determination.» dalam Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*. Diedit oleh Theresa Sandok. New York: Peter Lang, 187-195.

—. 1993. «The Person: Subject and Community.» dalam Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*. Diedit oleh Theresa Sandok. New York: Peter Lang, 219-261

—. 1993. «The Problem of the Constitution of Culture through Human Praxis.» dalam Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*. Diedit oleh Theresa Sandok. New York: Peter Lang, 263-275.

—. 1993. «Thomistic Personalism.» dalam Karol Wojtyła, *Person and Community: Selected Essays*. Diedit oleh Theresa Sandok. New York: Peter Lang, 165-175.

—. 2017. *Persona y acción*. Diedit oleh Juan Manuel Burgos. diterjemahkan oleh Rafael Mora. Madrid: Ediciones Palabra.